

GI

**PELAKSANAAN PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*
(PENGEMBANGAN MASYARAKAT) PT. SEBANGUN BUMI
ANDALAS *WOOD INDUSTRIES* DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**(Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang
Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**



Diajukan Oleh :

**FERI
0700 310 2014**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2007**

7
1

S
307.1407
Fer

R15610
15972

2007

**PELAKSANAAN PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*
(PENGEMBANGAN MASYARAKAT) PT. SEBANGUN BUMI
ANDALAS *WOOD INDUSTRIES* DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**(Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang
Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**



Diajukan Oleh :

**FERI
0700 310 2014**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*
(PENGEMBANGAN MASYARAKAT) PT. SEBANGUN BUMI
ANDALAS *WOOD INDUSTRIES* DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**(Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang Tiga
Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI)**

SKRIPSI

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti
ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

**F E R I
0700 310 2014**

Pembimbing I



**Drs. Yoyok Hendarso, MA
NIP. 131 473 349**

Pembimbing II



**Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 132 046 978**

**PELAKSANAAN PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*
(PENGEMBANGAN MASYARAKAT) PT. SEBANGUN BUMI
ANDALAS *WOOD INDUSTRIES* DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**(Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang Tiga
Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI)**

S K R I P S I

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada tanggal, 15 Februari 2007**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

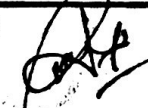
**Drs. Yoyok Hendarso, MA
Ketua**



**Dra. Yusnaini, M.Si
Anggota**



**Dra. Hj. Rogaiyah, M.Si
Anggota**



**Drs. Tri Agus Susanto, MS
Anggota**



**Dra. Dyah Hapsari ENH
Anggota**



**Indralaya,
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan,



**Drs. H. Slamet Widodo, MS, MM
NIP. 131 467 170**

PERNYATAAN

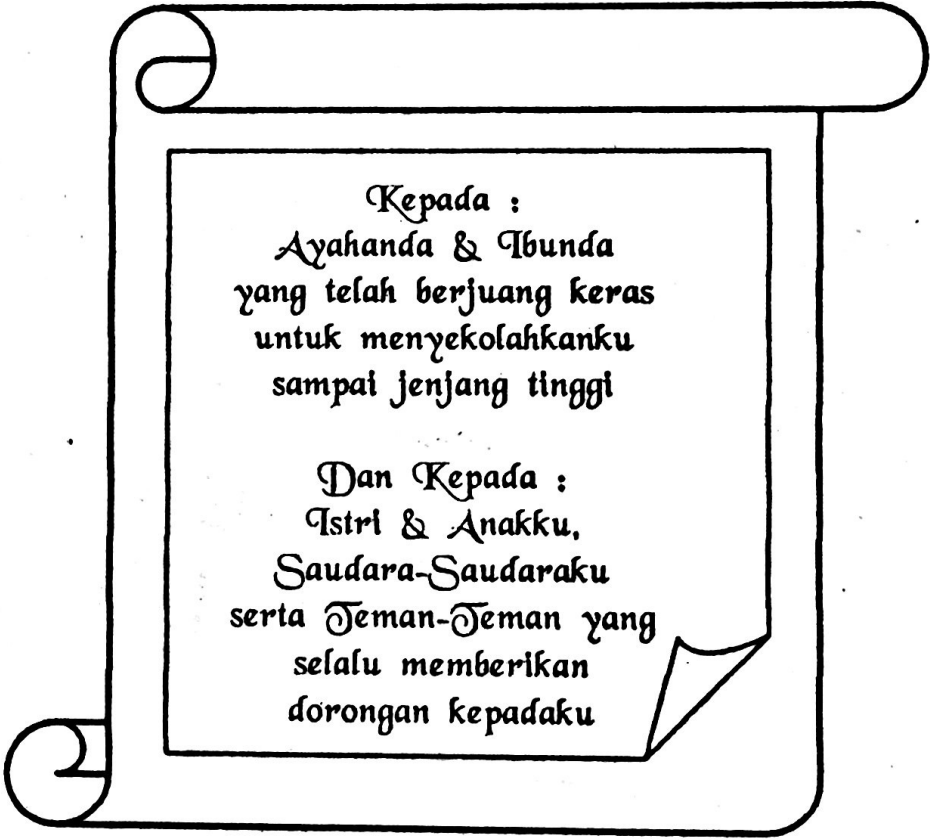
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang , Februari 2007

Penulis,

FERI

Kupersembahkan :



Kepada :
Ayahanda & Ibunda
yang telah berjuang keras
untuk menyekolahkanku
sampai jenjang tinggi

Dan Kepada :
Istri & Anakku,
Saudara-Saudaraku
serta Teman-Teman yang
selalu memberikan
dorongan kepadaku

MOTTO :



JADIKANLAH DIRIMU BERARTI
BAGI ORANG LAIN....

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) PT. Sebangun Bumi Andalas *Wood Industries* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI)” mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan program *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) PT. SBA WI dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan program pertanian tanpa bakar. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan deskripsi tentang program *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) PT. SBA WI dan mengetahui kendala-kendala yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan program *pertanian tanpa bakar*.

Penelitian bersifat deskriptif menggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis adalah Kelompok-Kelompok Tani yang terlibat dalam Program Pertanian Tanpa Bakar yang dijalankan oleh PT. SBA WI. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam pada 12 (dua belas) orang subyek penelitian serta dengan berperanserta sebagai pengamat. Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) PT. SBA WI telah dilaksanakan secara tersistematis. Perusahaan dalam hal ini telah membuat suatu perencanaan untuk melakukan program pertanian tanpa bakar dan sekaligus menyiapkan segala kebutuhan selama program ini dilaksanakan, seperti bantuan operasional dan memberikan bantuan penyuluhan kepada masyarakat. Program pertanian tanpa bakar ini sendiri dimulai pada bulan Januari 2006 dan hasil evaluasi dari pihak perusahaan sendiri menyatakan bahwa program pertanian bakar tidak memenuhi target yang diharapkan perusahaan, tetapi dari pihak masyarakat mereka beranggapan bahwa program pertanian tanpa bakar sudah mampu memberikan motivasi yang besar untuk lebih serius dalam kegiatan pertanian. Masyarakat juga masih berharap banyak dengan adanya perusahaan di desa mereka akan membantu mereka keluar dari keterbelakangan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan program pertanian tanpa bakar ini sendiri, terdapat banyak hambatan terutama ketika program tersebut dilaksanakan oleh petani. Hambatan-hambatan tersebut adalah terjadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti; *pertama*, faktor alam dan kondisi geografis; *kedua*, faktor hama dan penyakit tumbuhan; dan *ketiga*, faktor sumber daya yang meliputi bantuan operasional perusahaan dan faktor sumber daya manusia.

Kata Kunci : *Community Development, Kesejahteraan Sosial, Kelompok Tani*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan program *Community Development* PT. Sebangun Bumi Andalas *Wood Industries* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada Anggota Kelompok Tani di Desa Simpang Tiga Saktri Kecamatan Tulung Selapan OKI” ini dapat diselesaikan. Penulisan Skripsi ini merupakan sebagian syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh studi sarjana S-1 pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Proses pembuatan skripsi ini sendiri sangat melibatkan bantuan dan kerjasama begitu banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs.H. Slamet Widodo, MS, MM selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH sebagai Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Yunindyawati, S.Sos, M.Si sebagai Sekertaris Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Yoyok Hendarso, M.A sebagai dosen pembimbing I yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan diskusi yang mampu membuka cakrawala berpikir penulis

dalam meniti kehidupan ilmiah, arahan serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra.Yusnaini, M.Si sebagai dosen pembimbing II telah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan wawasan kepada penulis dengan pemikiran-pemikirannya yang cukup *open minded* bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen FISIP khususnya para dosen Jurusan Sosiologi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
7. Kepada seluruh staff beserta karyawan FISIP UNSRI terima kasih untuk kebersamaannya selama ini, terutama untuk kakak kami tercinta Ibrahim Effendy, S.Sos, terima kasih untuk support dan motivasinya kepada penulis.
8. Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesanku beserta seluruh keluarga besar kami yang selalu memberi semangat untuk berbuat yang terbaik dalam hidup dan menjadikanku berarti seperti saat ini, terima kasih untuk kepercayaan, cinta, dan sayang yang telah diberikan kepada penulis.
9. Istriku tercinta Hanifa Hasyim yang selalu setia menemaniku dalam setiap kebingungan yang dihadapi.
10. Anakku *Aulia Fitri Annisa* yang selalu memberikan senyuman pada setiap hari-hariku.
11. Mas Karso dan *Yai* Sawal yang telah memberikan motivasi spiritual selama penulis mengerjakan skripsi ini.

12. Saudara-saudaraku Sukman, Yamin, Yulia serta Nang Item yang memberikan inspirasi kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan studi.
13. Teman-teman seperjuanganku Abie, Aam Bule, Dedek, Engga patkai, Guntur, beserta seluruh mahasiswa sosiologi angkatan 2000, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas bantuan dan arahan selama proses pembuatan skripsi ini.
14. Teman-teman di Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2000, Dani, Tado, Eska, S.IP, Ajay, S.IP, Nyekti, S.IP, Akbar, S.IP, Junkiess, S.IP, Ahmen, Sayyid si teroris dan semuanya, terima kasih atas persahabatan selama ini.
15. Teman-temanku di Jurusan Sosiologi Angkatan 1998 s/d 2006 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semuanya thank's untuk kebersamaannya.
16. Kawan-kawan di KAMMI, Mafesripala, FORMAPATI, IMPP, HMPPT, LSM BAKAU, WALHI, Team 9 yang gagal, perjuangan Pantai Timur yang lagi mati suri
17. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kalian berhasil dengan kerja keras kalian.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Palembang, Februari 2007

FERI

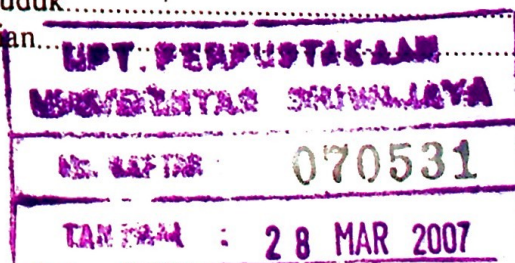
DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Motto.....	vi
Intisari.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel dan Bagan.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	27
E.1. Sifat dan Jenis Penelitian	27
E.2. Lokasi Penelitian.....	28
E.3. Batasan Penelitian.....	29
E.4. Unit Analisis Data	29
E.5. Peranan Peneliti.....	30
E.6. Informan Penelitian.....	30
F. Data dan Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G.1. Observasi.....	32
G.2. Wawancara Mendalam.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	40
A. Penelitian yang relevan.....	46
B. Studi pustaka.....	50

BAB III DESKRIPSI LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum desa Simpang Tiga Sakti.....	51
A.1. Mobilitas penduduk.....	51
A.2. Mata pencaharian.....	52



B. Gambaran umum perusahaan.....	53
B.1. Latar belakang.....	53
B.2. Tujuan.....	57
B.3. Kegunaan	57
B.4. PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.	59
B.4.1. Visi dan Misi.....	59
B.4.2. Profil perusahaan.....	64
B.4.3. Data fisik lapangan.....	65
B.4.4. Data keadaan hutan.....	66
BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	67
A.. Program-program community development PT. SBA WI....	67
B. Pelaksanaan program pertanian tanpa bakar	74
B.1.. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program	76
B.1.1. Faktor Alam dan kondisi geografis	76
B.1.2. Faktor Hama dan penyakit tumbuhan	80
B.1.3. Faktor sumber daya	83
B.1.3.1. Bantuan operasional yang kurang memadai	83
B.1.3.2. Faktor sumber daya manusia	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1.	<i>Perbedaan Program Pembangunan Hti Dengan Program Reboisasi</i>	13
Tabel 1.2.	Daftar informan penelitian	31
Tabel 3.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk desa Simpang Tiga Sakti	48
Tabel 3.2.	Perkembangan mata pencaharian masyarakat desa Simpang Tiga Sakti	49
Tabel 3.3.	Perkembangan areal IUPHHK pada tanaman hutan berdasarkan Peta Kawasab hutan dan perairan propinsi Sumatera Selatan	62
Tabel 3.4.	Keadaan hutan berdasar kan peta hasil penafsiran potret udara/citra satelit	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sumber daya alam yang berupa hutan, tanah, air dan beserta lingkungan hidupnya terdapat hal-hal yang menarik dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Ketergantungan manusia dengan lingkungan alam tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Hampir semua kebutuhan manusia baik yang primer maupun skunder disediakan oleh alam lingkungan yang ada di dunia. Tidak hanya kebutuhan manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai sebuah kesatuan sosial pun tidak terlepas dari ketergantungan terhadap lingkungan alam. Sebagai gambaran, bagi perekonomian Indonesia sector pertanian dan kehutanan masih menjadi andalan. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa, pengurangan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Khusus masalah kehutanan, sektor yang berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam terbarui ini sejak awal diyakini semua pihak sebagai sebuah sektor yang berkelanjutan. Luasan kawasan hutannya menurut menurut hitungan resmi terkini seluruhnya mencapai kurang lebih 120 juta hektar, diyakini mampu menjadi sumber kehidupan langsung bagi sekitar 20 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang hidup didalam dan disekitar kawasan hutan, (Untung Iskadar, 2004;1).

Selama ini, masyarakat disekitar kawasan hutan hampir 100% menggantungkan hidupnya dari kemurahan lingkungan hutan yang begitu banyak menyediakan kebutuhan masyarakat baik yang primer maupun yang sekunder. Namun, walaupun masyarakat sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari hutan bukan berarti mengabaikan kelestarian keutuhan hutan itu sendiri. Masyarakat sadar sepenuhnya bahwa dengan menghancurkan hutan berarti juga menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sehingga terjalin hubungan yang harmoni antara manusia dan lingkungan yang pada akhirnya menciptakan keselarasan kehidupan manusia itu sendiri. Hutan bagi mereka adalah jaminan bagi ketahanan makanan atau *food security*.

Hubungan antara petani hutan dan hutan sangat erat. Keeratan hubungan tersebut dapat dilihat dari sistem nilai yang dianut masyarakat ketika mereka melakukan aktifitas yang berhubungan dengan lingkungan alamnya. Aktivitas masyarakat sekitar hutan akan berpengaruh terhadap kondisi hutannya. Karena dengan kesadaran masyarakat sekitar yang tinggi maka akan memperlihatkan kondisi hutan yang baik sehingga dapat diambil manfaatnya tanpa harus merusak keberadaan sumber daya hutan. Sebaliknya jika kesadaran masyarakat rendah terhadap kepentingan hutan itu sendiri maka masyarakat itu sendiri yang akan dirugikan karena tidak ada manfaat yang dapat diambil untuk menunjang kehidupan masyarakat (Wiersum dalam Anonim, 1988).

Tetapi, di beberapa tempat, keharmonisan tersebut sama sekali tidak berlaku, apalagi pada masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang pernah diberikan HPH (Hak Pengusahaan atas Hutan), terjadi

hubungan parasitisme diantara manusia dan lingkungan alamnya, dimana alam yang selalu dirugikan. Kerusakan hutan yang begitu parah terjadi dimana-mana yang pada akhirnya menyengsarakan kehidupan mereka sendiri.

Demikian halnya yang ada di kawasan timur OKI, hutan yang dahulu begitu luas, yang tersisa kini adalah hamparan padang gundul disepanjang mata memandang. Tidak adalah lagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar kawasan tersebut. Ratusan ribu hektar hamparan lahan gundul yang ada sebagai hasil dari penebangan yang dilakukan para pemegang HPH. Yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat yang tinggal didalam maupun disekitar hutan. Apalagi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kemurahan alam lingkungan yang disediakan disekitar mereka.

Desa Simpang Tiga Sakti, merupakan satu diantara desa yang berada dikawasan hutan yang telah gundul tersebut. Pada awalnya mereka adalah perambah hutan yang datang dari desa-desa disekitar kawasan tersebut. Setelah sekian lama mereka hidup didalam kelompok tersebut sehingga terbentuk sebuah kesatuan sosial yang kemudian disusul menjadi kesatuan administratif dalam bentuk desa. Ketika kawasan hutan masih berupa tegakan-tegakan kayu yang begitu banyak, masyarakat tidak mengkhawatirkan kesejahteraan hidup mereka. Hampir semua kebutuhan hidup dapat terpenuhi ketika mereka melakukan aktivitas ekonomi dikawasan hutan tersebut. Namun, ketika tegakkan kayu di kawasan hutan tersebut telah habis seperti sekarang, beban kehidupan menjadi nyata beratnya. Mereka harus berfikir keras untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sedangkan alam tidak lagi semurah dulu dalam memberikan

kekayaannya. Otomatis mereka harus kreatif memanfaatkan sisa kekayaan alam tersebut untuk kebutuhan hidupnya kalau tidak mau hidup dalam kelaparan.

Sejak rezim orde baru berkuasa mulai pertengahan tahun 1960-an, pemerintah berupaya menggenjot pertumbuhan devisa melalui eksploitasi sumber daya alam termasuk hutan yang diatur dengan Undang-undang No. 6/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang No. 6/1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). hasilnya, sampai dengan awal 1980-an, lebih dari 70% hasil hutan dijual dalam bentuk kayu bulat (Yustika,2005).

Bisa dibayangkan bagaimana laju kerusakan hutan yang di legitimasi oleh kekuatan hukum. Masyarakat mau tak mau harus patuh pada hukum negara walaupun harus mengabaikan kesadaran akan kelestarian alam lingkungan bagi kelangsungan hidupnya. Dengan iming-iming pendapatan ekonomi yang besar dengan cara menghancurkan alam, masyarakat kembali kepada naluri kemanusiaannya yaitu mendapat kesejahteraan dan kekayaan. Hutan yang meliputi 60% luas daratan Indonesia yang merupakan kekayaan yang harus dipertahankan tidak lagi menjadi maskot kelangsungan hidup manusia. Yang tampak adalah lahan ekonomi yang harus dijamah semaksimal mungkin.

Padahal, semangat pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan secara bersama-sama harus mengakomodir berbagai

kelompok kepentingan, tidak hanya kepentingan departemen kehutanan atau pemodal besar tetapi juga kepentingan petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat lainnya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai barbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Kehutanan No. 41/1999 pasal 22” penyelenggaraan kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.”

Efek langsung yang akan muncul apabila laju kerusakan hutan tersebut tidak secepatnya dihentikan adalah hancurnya struktur ekonomi masyarakat dan hancurnya ekosistem alam. Ketika struktur ekonomi masyarakat hancur maka eksesnya secara mikro adalah munculnya gejala permasalahan baru didalam masyarakat dalam segala bidang dan secara makro adalah dapat menggoyah sistem perekonomian negara. Apalagi pada masyarakat yang struktur ekonominya belum begitu kuat untuk melindungi masyarakat dari goncangan-goncangan pada objek ekonomi mereka sendiri. Seperti pada masyarakat perambah hutan yang menggantungkan mata pencahariannya dari keberadaan hutan, jika hutan itu habis maka habis juga sumber penghasilan mereka. Tidak ada alternatif lain yang dapat menggantikan sumber penghasilan sebelumnya.

Ditengah krisis sumber ekonomi seperti itu, keberadaan perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang hidup didalam atau disekitar hutan. Disamping sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi, HTI juga dipandang sebagai alternatif

yang mampu “diandalkan” untuk mempertahankan kehidupan masyarakat setempat yang sekaligus mengembalikan keberadaan hutan. Berlandaskan hal tersebut, Pemerintah menetapkan program Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai usaha untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak dan kritis. Sasaran pembangunan HTI juga meliputi penyediaan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat sekitar hutan serta memperbaiki mutu lingkungan.

PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries yang bergerak pada program Hutan Tanaman Industri mendapatkan konsensi areal dikawasan Timur OKI. Hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merehabilitasi kawasan hutan yang rusak. Keberadaan dan aktivitas PT.SBA WI di Kabupaten OKI diperkuat dengan SK Menteri No. 125/Kpts-II/18 Februari 1998. Kemudian Addendum SK. Menteri Kehutanan No. 347/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004 dan SK Menteri Kehutanan No.339/Kpts-II/2004 tanggal 7 September 2004. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut, maka perusahaan memiliki hak untuk mengelolah dan memanfaatkan areal yang telah diberikan sekaligus berkewajiban membangun masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan yang dikuasainya.

Untuk melakukan kewajibannya tersebut maka PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries membuat program *community development* (*pengembangan masyarakat*) sebagai implementasi dari *Corporate Social Resposibility* (CSR) yang diberikan pada perusahaan. *Community development* (*pengembangan masyarakat*) merupakan program perusahaan dalam membantu masyarakat yang berada didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya, program pembangunan HTI di Kabupaten Ogan Komering Ilir benar-benar memberikan nilai lebih bagi masyarakat di kabupaten OKI, dan khususnya di desa-desa sekitar proyek tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan yang bergerak disektor kehutanan adalah terjadinya kebakaran hutan diwilayah kelolah mereka. Dengan adanya kebakaran tesebut akan menghancurkan seluruh investasi yang mereka tanam. Apalagi wilayah kelolah PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries adalah daerah yang berupa lahan hutan rawa-rawa gambut yang sangat mudah terbakar. Ditambah lagi dengan adanya kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan pembakaran hutan guna membuka lahan pertanian yang mereka sebut *sonor* ataupun mencari kayu hutan untuk ditebang dan dijual.

Begitupun masyarakat didesa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI dan desa-desa lain yang termasuk dalam wilayah kelolah PT. SBA WI, mereka juga melakukan pembakaran hutan untuk keperluan tersebut. Terutama pada musim kemarau, dimana lahan rawa-rawa gambut disini menjadi kering sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pembakaran.

Untuk mengantisifasi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan tersebut, dalam hal ini perusahaan berinisiatif untuk membantu masyarakat membuka lahan pertanian sekaligus menghindarkan perusahaan dari bencana kebakaran hutan. Sehingga muncul pemikiran untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat dari pembakaran hutan mejadi kegiatan dengan tanpa pembakaran.

Dari pengamatan yang dilakukan perusahaan pada masyarakat desa Simpang Tiga sakti yang diteruskan dengan penggalian potensi-potensi desa bersama masyarakat setempat, maka muncul pemikiran untuk membuat program *Pertanian Tanpa Bakar*. Konsep awal yang dipakai untuk pertanian tanpa bakar adalah masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan pertanian dan investasi perusahaan di wilayah tersebut aman dari kebakaran hutan.

Pada bulan Januari tahun 2006, program pertanian tanpa bakar mulai di sosialisasikan ke masyarakat desa Simpang Tiga Sakti. Dari sosialisai tersebut, terbentuk 5 (lima) kelompok tani yang masing-masing kelompok di ketuai oleh satu orang sebagai ketua. Pada nantinya kelompok-kelompok tani tersebut di berikan segala kebutuhan untuk mengelolah lahan-lahan mereka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program *Community development* (pengembangan masyarakat) PT.SBA WI terhadap masyarakat Simpang Tiga sakti ?
2. Apa kendala yang dialami masyarakat dalam menjalankan program pertanian tanpa bakar?

C. Tujuan dan Manfaat

C.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan deskripsi tentang program *community development (pengembangan masyarakat)* PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dirasakan masyarakat dalam menjalankan program *pertanian tanpa bakar*.

C.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya Sosiologi dalam mengkaji dan memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan usaha masyarakat dalam melakukan fungsi dan perannya dalam rotasi kehidupan dunia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan rujukan bagi studi lanjutan dalam mengungkap berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan-perubahan

dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi.

2. Sebagai bahan rekomendasi bagi lembaga-lembaga baik formal dan non-formal dalam memperhatikan dan menindaklanjuti secara proporsional kebijakan tentang program-program kesejahteraan masyarakat terutama di sektor kehutanan yang melibatkan para investor-investor baik dari dalam maupun dari luar negeri.

D. Kerangka Pemikiran

D.1. Hutan Tanaman Industri (HTI).

Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan terobosan sektor kehutanan dalam mengatasi kebuntuan sektor kehutanan indonesia. Konsep HPH (Hak Penguasaan Hutan) yang telah dijalankan pada dekade delapan puluhan dengan menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang diperbaharui menjadi Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) telah banyak mengalami mengalami kegagalan, bahkan HPH dituding menjadi pemicu pembalakan liar yang mengakibatkan rusaknya hutan Indonesia secara masif. Dengan kegagalan dan kelemahan sistem yang ada, pemerintah berusaha membuat suatu terobosan guna mempertahankan hutan dengan lebih mengutamakan kelestarian tanpa harus mengeksploitasi hutan alam secara besar-besaran. Dengan dasar pemikiran tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1990, yang mengatur tentang Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurut PP tersebut, yang dimaksud Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah *Hutan*

tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Dari definisi HTI tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama pelaksanaan HTI adalah untuk menjaga kesinambungan produksi (*sustainability*) dengan silvikultur buatan yang berorientasi pada kesinambungan bahan baku, tanpa merambah hutan alam yang ada. Sebagai suatu program, Hutan Tanaman Industri diharapkan dapat menekan laju kerusakan hutan di Indonesia, hal ini tercermin pada bagian lain PP No 7 tahun 1990, bahwa pembangunan HTI hanya dilakukan pada areal / kawasan hutan yang sudah tidak produktif, sehingga Hutan alam yang tersisa dapat dipertahankan. Meskipun PP ini akhirnya diganti dengan PP No 6 Tahun 1999, namun filosofi PP no 7 tahun 1990 tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan HTI. Bahkan PP No 6 Tahun 1999 lebih mempertajam dengan penjelasan bahwa Hutan Tanaman Industri/ pengembangan Hutan Tanaman adalah untuk memperbaiki potensi hutan yang terlanjur rusak, tanpa menimbang untuk memenuhi ketidak pastian bahan baku industri.

Dengan perubahan Peraturan Pemerintah ini, ada sedikit perubahan pandangan terhadap Hutan Tanaman Industri, yakni peralihan dari sekedar hanya untuk rehabilitasi hutan, kini bergeser pada rehabilitasi hutan yang komersial, ekonomis, produktif dan lestari. Ada beberapa alasan mendasar yang menjadikan HTI sebagai alternatif bidang kehutanan, yaitu :

1. Memperbaiki tampang (*posture*) sektor publik kehutanan dari yang semula hanya mampu melakukan manajemen eksploitatif berubah ke manajemen

service dan produksi sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resources*).

2. Menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan hutan dapat sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha swasta asalkan keamanan usahanya dijamin.
3. Mengenalkan sebuah sistem silvikultur baru, yaitu "Tanam pasti, Tebang Pasti" sebagai ganti tebang habis dengan permudaan buatan. Sistem Silvikultur kedua ini hanya layak diterapkan pada konversi hutan alam, baik hutan produksi, hutan konservasi, maupun hutan lindung untuk diubah menjadi hutan tanaman industri. Sebaliknya, sistem silvikultur pertama menegaskan bahwa sebelum memanen harus menanam terlebih dahulu.
4. Membangun dasar industri kehutanan dari sumber yang terbarukan secara nyata
5. Mengenalkan masyarakat (dan pejabat) atas budaya industri yang antara lain patuh dan menghargai komitmen dan perjanjian kerja (*comitment*), kualitas produk (*quality*), efisiensi produksi (*cost minimization*) dan patuh pada *timely delivery*.
6. Mampu menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, lebih banyak dari pada yang dapat disediakan oleh hutan alam.
7. Mampu mengkonservasi sisa hutan alam yang tertinggal.
8. Mampu merehabilitasi hutan alam yang sudah sangat rusak (*degraded*) bahkan *deforested*.

9. Secara nyata di lapangan mampu melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen sumber daya hutan terbarukan bagi semua pihak yang sangat berguna bagi proses desentralisasi manajemen hutan.
10. Mampu menyediakan fasilitas dan lapangan bagi diklat manajemen industri, yang mampu mengaitkan antara industri primer, sekunder dan tersier sebagai bahan integral dalam usaha menuju manajemen hutan lestari yang sekaligus mengintegrasikan manajemen hutan alam dan hutan tanaman industri.
11. Meningkatkan kepercayaan diri (*self esteem*) bahwa stake holders sektor kehutanan mampu melakukan kerja raksasa. (*Untung Iskandar, 2004*).

Dengan alasan-alasan inilah HTI menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi krisis sektor kehutanan di Indonesia, sehingga diharapkan mampu membangkitkan kembali kejayaan sektor kehutanan seperti pada dekade tujuh puluhan. Harapan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Hutan Tanaman Industri itu sendiri, yaitu :

1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Sedangkan tujuan formal pembangunan HTI secara sistematis dapat difahami dalam empat tujuan pokok, yaitun :

1. Meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi yang kritis dan tidak produktif.

2. Membangun hutan untuk menghasilkan bahan baku industri hasil hutan.
3. Membangun industri hasil hutan yang hasil-hasil industrinya dapat dipasok ke pasar global.
4. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.(
Untung Iskandar, 2005).

Secara perspektif lingkungan, Pembangunan Hutan Tanaman Industri lebih ramah lingkungan, dikarenakan lebih bersifat reboisasi dan rehabilitasi. Pada kerangka reboisasi, berasal dari bahasa perancis dengan akar kata *bois* yang artinya hutan, konsep tersebut berarti kegiatan penghutanan kembali. Sedangkan dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan istilah *reforestation*, yakni kegiatan dengan sengaja untuk mengubah kawasan tidak berhutan (yaitu kawasan kritis atau kawasan yang sebelumnya memang berupa hutan) menjadi kawasan yang berhutan kembali (UNFCCC, 2001). Meskipun pada prakteknya Hutan Tanaman Industri merupakan kegiatan rehabilitasi lahan hutan, ada beberapa hal yang membedakannya dengan program reboisasi atau rehabilitasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel 1.1.

Perbedaan program pembangunan HTI dengan Program reboisasi

No	Indikator	Program Pembangunan HTI	Program reboisasi atau rehabilitasi
1	Kawasan Sasaran	Dibangun dikawasan hutan produksi yang tidak produktif	Disemua kawasan yang dikehendaki untuk dihutankan kembali
2	Sifat Usaha	Semuanya bersifat komersial bisnis dan terkait langsung dengan industri	Bertujuan untuk memperbaiki mutu lingkungan, mencegah erosi, sedimentasi dan pendakalan bangunan air.

3	Keterlibatan para pihak	Dilakukan dengan pelaku bisnis, harus menyediakan bahan baku idustri dan mampu memperluas kesempatan kerja serta kesempatan berusaha	Dilakukan oleh birokrat bersama masyarakat, karena tidak memiliki sasaran bisnis yang pasti
---	-------------------------	--	---

Sedangkan pada prosesnya, Hutan Tanaman Industri juga harus menggunakan konsep Manajemen Hutan Lestari, yakni sebuah proses manajemen hutan untuk mencapai berbagai sasaran secara simultan yang mempunyai hubungan yang jelas dengan produk dan jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan (*sustainable*) dengan tidak mengurangi kemampuan produksi hutan, serta tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (*environment*) dan tidak menimbulkan dampak sosial. Jadi jelas bahwa Hutan Tanaman Industri harus mengusung tiga konsep lestari yaitu lestari produksi, lestari lingkungan dan lestari sosial.

Pelaksanaan pembangunan HTI di Indonesia pada prakteknya melibatkan dua sektor, yakni Pemerintah dan Swasta. Hal ini bisa dilihat dari segi pendanaan dan operasional lapangan. Dari segi pendanaan, keterlibatan pemerintah berupa pengucuran Dana Reboisasi (DR) , sedangkan dalam segi operasional lapangan, dapat dilihat dari terbantunya institusi Badan Usaha Patungan Kehutanan (BUPK) yang mendampingi sektor swasta dalam melaksanakan program HTI. Kolaborasi ini bisa dilihat pada perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi, seperti PT. Musi Hutan Persada (MHP), PT Menara Hutan Buana, dan lain-lain. Namun pada prakteknya tidak semua perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri memanfaatkan dana dari pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Group Sinar Mas di Sumatera Selatan, yakni PT. Sebangun Bumi Andalas (SBA), PT.

Bumi Andalas Permai (BAP), dan PT. Bumi Mekar Hijau. (BMH) Dibawah komando Forestry Division Sinar Mas Group, perusahaan-perusahaan ini beraktivitas dalam wilayah konsesi yang dimilikinya dengan melibatkan pihak-pihak terkait, mulai pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan mulai dari pembuatan infrastruktur seperti Base camp, Kanal, sekat bakar dan lainnya tak dapat dilakukan perusahaan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Sehingga dalam pelaksanaannya keterkaitan perusahaan terhadap masyarakat lokal sangat tinggi, terutama sebagai mitra lokal dan keamanan investasi perusahaan.

Masyarakat lokal, atau dalam istilah kehutanan Masyarakat Desa Hutan mempunyai keterkaitan yang jelas terhadap pembangunan Hutan Tanaman Industri, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan HTI. Keberadaan masyarakat di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan menjadi tantangan bagi perusahaan HTI dalam mengimplementasikan Manajemen Hutan Lestari, khususnya Lestari Sosial. Persoalan masyarakat Desa Hutan ini pun telah di akomodir oleh pemerintah khususnya Departemen Kehutanan dalam kerangka Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, atau dalam istilah sekarang Social Forestry. Sebagai kelompok masyarakat/komunitas terisolasi (*tribal community*) keberadaan perusahaan HTI dapat menjadi ancaman atau sebaliknya menjadi peluang bagi masyarakat tersebut dalam mencapai kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Peluang inilah yang ditangkap oleh PT. Sebangun Bumi Andalas WI dalam pelaksanaan pembangunan HTI di kawasan Desa Simpang Tiga Sakti Kec Tulung Selapan Kabupaten Ogan

Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan untuk berperan serta dalam pembinaan masyarakat desa hutan di Kabupaten OKI. Sehingga keberadaan perusahaan dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat di desa tersebut dengan program – program yang di susun dalam perusahaan khususnya pada Unit Pengembangan Masyarakat (*Community development (pengembangan masyarakat) Unit*).

D.2. *Community development (pengembangan masyarakat) (CD)*

Prinsip keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri adalah hal pokok dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yang memerlukan keseimbangan dalam hal lingkungan hidup, faktor-faktor sosial dan ekonomi sebagai pemenuhan dari berbagai kepentingan. Hubungan antara masyarakat, alam serta lokasi sumber daya mineral dan perusahaan sebaiknya bersifat saling bekerjasama dan saling memanfaatkan.

Program *Community development (pengembangan masyarakat)* sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diberikan pada perusahaan. *Community development (pengembangan masyarakat)* merupakan program perusahaan dalam membantu masyarakat yang berada didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara hakekat, *Community development (pengembangan masyarakat)* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh korporat, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komuniti-komuniti lokal. Artinya bahwa korporat adalah sebuah elemen dari serangkaian elemen hidup yang berlaku dimasyarakat. Sebagai salah satu elemen, berarti korporat masuk dalam struktur

sosial masyarakat setempat dan berfungsi terhadap elemen yang ada. Dengan kesadarannya, korporat harus dapat membawa komuniti-komuniti lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial yang telah ada. (Rudito, 2003). Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program yang ditawarkan korporat ke masyarakat harus berbasis dari masyarakat itu sendiri. Dan memposisikan diri sebagai bagian dari sistem yang ada dalam lingkungan sosial dimana korporat berada. Interaksi komuniti-komuniti dalam masyarakat dengan komuniti korporat adalah masalah yang kompleks dan kaya dengan variasi, sehingga korporat harus mempunyai *Community development (pengembangan masyarakat) Guidelines* yang jelas namun luwes yang dapat memahami struktur sosial dan kebudayaan komuniti lokal.

Secara umum *community development (pengembangan masyarakat)* diartikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. (Budimanta, 2002). Jadi jelas bahwa *community development (pengembangan masyarakat)* bukanlah suatu program yang hanya berupa "charity" dari korporat kepada masyarakat/komuniti lokal, atau sekedar topeng kebaikan korporat, namun lebih dari itu, yakni adanya suatu perencanaan yang matang, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari master plan investasi jangka panjang korporat. Disamping itu, keterkaitan korporat dengan masyarakat lokal dan kehidupan masyarakat lokal sangat mutlak untuk dilakukan, agar kegiatan korporat dalam



rangka pelaksanaan *community development* (pengembangan masyarakat) dapat beradaptasi dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan juga aktifitas keseharian yang ada dalam masyarakat.

Ada tiga alasan penting perusahaan melakukan program pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Untuk mendapatkan izin lokal (izin lokal adalah usaha perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan komunitas lokal dalam kerangka menciptakan keharmonisan kegiatan usaha dengan komunitas lokal).
2. Mengatur dan menciptakan strategi kedepan yang dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat dalam rangka kemandirian masyarakat.
3. Program pengembangan masyarakat mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan.

(Wimpy S.Tjetjep, dalam seminar nasional CSR 26 Mei 2005)

Teori *Community development* (pengembangan masyarakat) dan prakteknya harus memilih fokus pada hubungan antar kelompok dan mediasi untuk mencapai keadilan dan pembangunan yang merata. Michael Cernea (1993) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai bila hanya mengandalkan ekspansi ekonomi, pengolahan lingkungan dan akumulasi teknologi saja, akan tetapi juga faktor lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat perlu mendapat perhatian.

Menurut Sumodiningrat, *Community development* (pengembangan masyarakat) takkan berhasil tanpa adanya dukungan keberdayaan dari masyarakat itu sendiri, yaitu melalui peningkatan kemampuan individu untuk

mengembangkan kemampuan diri dalam meniti kehidupan bermasyarakat (Agung Nugraha, 2005). Ada beberapa strategi yang harus dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, kedua memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, ketiga memberdayakan dalam arti melindungi.

Secara umum bentuk keberhasilan dari suatu korporat dalam aktivitasnya didalam sebuah masyarakat adalah tidak hanya diterimanya perusahaan yang bersangkutan untuk beraktivitas akan tetapi juga dapat berpartisipasi dan berfungsi penuh terhadap kehidupan masyarakat secara umum sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, politik dan teknologi. Sarana yang digunakan dalam rangka implementasi konsep *corporate social responsibility* adalah dengan program *community development* (*pengembangan masyarakat*), sehingga keberhasilan dalam program *community development* (*pengembangan masyarakat*) adalah salah satu keberhasilan dalam menerapkan konsep *corporate social responsibility*. Indikator yang dapat dipakai adalah perubahan sosial dan lingkungan yang dapat diterima dan diatur oleh pranata sosial yang ada yang bersumber dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan (Adi Prasetijo, 2004).

Untuk merealisasikan program *community development* (*pengembangan masyarakat*), PT. SBA WI memilih masyarakat yang ada didalam maupun disekitar kawasan hutan tanaman industri yang meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pampangan, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengan, Kecamatan Air Sugihan. Pada saat ini sebagai tahap awal PT. SBA WI menjadikan Desa Simpang Tiga Sakti Kec. Tulung Selapan sebagai sasaran

program *Community development* (*pengembangan masyarakat*) perusahaan. Program ini dilakukan melalui pengelolaan bantuan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pencapaian sasaran kegiatan industri tentunya sangat memperhatikan fungsi produksi dan fungsi sosial yang merupakan momentum yang ingin dicapai oleh industri dalam upaya melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Untuk mencapai keinginan tersebut maka pengembangan masyarakat harus diarahkan, dirancang dan direncanakan secara matang, sistematis dan hati-hati. Dengan demikian kegiatan pengembangan masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem, dimana perubahan pada suatu komponen kegiatan akan merubah komponen kegiatan lainnya. Artinya terlihat keteraturan hubungan dan keterkaitan antar komponen-komponen yang terlibat.

Community development pada dasarnya berpangkal pada konsep pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengangkat potensi lokal yang dimiliki masyarakat setempat. Pemberdayaan manujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan an lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemamoua alam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*fredom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Beberapa ahli berpendapat tentang definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
- Pemberdayaan adalah sebuah proses mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, et.al., 1994).
- Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang

bersifat fisi, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pecaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses.

D.3. Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan Sosial (*Sosial Welfare Development*) didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi (*l'conomic capital*), manusia (*human capital*), kemasyarakatan (*societal capital*), dan perlindungan (*security capital*) secara terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tumbuhnya mata pencaharian (*Livelihood*) masyarakat yang memungkinkan mereka mampu memperoleh dan mengelola aset-aset finansial dan material untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusiaan yang layak dan berkelanjutan. Peningkatan modal manusia adalah berkembangnya kemampuan dan kapabilitas (*capability*) intelektual, emosional dan spiritual manusia yang memungkinkan mereka mampu menjalankan peran-peran sosial adekwat dalam kehidupannya. Peningkatan modal kemasyarakatan (*social capital*) adalah tumbuh dan menyebarnya kepercayaan diantara berbagai elemen masyarakat. Sedangkan, terciptanya keamanan dan keterjaminan (*security*) adalah tujuan utama dari proses peningkatan modal perlindungan, (Suharto, 2005).

PBB memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 merumuskan kesejahteraan sosial sebagai :

" suatu tatanan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmania, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Artinya kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari sebuah kegiatan pembangunan. Kesejahteraan sosial dapat

juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Pemaknaan kesejahteraan sosial sebagai sarana atau wahana atau alat (*means*) untuk mencapai tujuan pembangunan, (Suharto, 2004).

Peningkatan kesejahteraan sosial adalah usaha usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup :

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan meliputi penerapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan yang meliputi

orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, pasangan yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan atau dilacurkan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial.

D.4. Modernisasi.

Bagian penting dari proses sosial adalah proses modernisasi yang merupakan suatu perubahan "total" dari suatu masyarakat dalam keadaan tradisional menuju suatu masyarakat "maju", (Phil.Astrid S.Susanto,1979). Modernisasi yang menjadi pokok utama untuk negara-negara berkembang adalah kemajuan ekonomi; perubahan dari sistem ekonomi agraria menuju sistem ekonomi industrialisasi, dengan harapan bahwa perubahan ini akan dapat menghasilkan perbaikan nasib.

Makna modernisasi paling khusus hanya mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal dan melukiskan upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan dengan mereka pada periode historis yang sama dalam masyarakat global,(Piotr Sztompka,2004).

Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritis modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara, historis, relatif dan analisis.

Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan Westernisasi atau Amerikatisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang dijadikan model. Eisenstadt (1966:1) mengatakan :

"secara historis modernisasi adalah proses perubahan menuju sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah maju di eropa Barat dan amerika utara di abad ke 17 hingga 19 dan kemudian menyebar ke negara eropa lain dan dari abad ke-19 dan 20 ke negara Amerika Selatan, Asia dan Afrika".

Wilbert Moore mengatakan: *modernisasi adalah transformasi total masyarakat tradisional atau pra-modern ketipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyerupai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. (1963b:89)*

Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh rakyat banyak maupun dari elit penguasa.

Definisi untuk analisis berciri lebih khusus dari kedua definisi tadi, yakni melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pro-modern. Neil smelser melukiskan modernisasi sebagai transisi multi dimensional yang meliputi enam bidang. Modernisasi dibidang ekonomi berarti (1) mengakarnya teknologi dalam ilmu pengetahuan; (2) bergerak dari pertanian subsistensi ke pertanian komersil; (3) pergantian tenaga binatang dan manusia oleh energi benda mati dan mesin; (4) berkembangnya bentuk pemukiman urban dan konsentrasi tenaga kerja ditempat tertentu. Dibidang politik, ditandai oleh transisi dari kekuasaan suku ke sistem hak pilih, perwakilan, partai politik, dan kekuasaan demokratis. Dibidang pendidikan

modernisasi meliputi penurunan angka buta huruf dan peningkatan perhatian pada pengetahuan, keterampilan dan kecakapan. Dibiidang agama ditandai oleh skulerisasi. Dibiidang kehidupan keluarga ditandai oleh kurangnya ikatan kekeluargaan dan makin besarnya spesialisasi fungsional keluarga. Dibiidang stratifikasi, modernisasi berarti penekanan pada mobilitas dan prestasi individual ketimbang pada status yang diwarisi (1973:747-748)

Dalam perspektif psikologis, kepribadian modern dilukiskan sebagai berikut:(1) bias dari kekuasaan tradisional, antidogmatis dalam berfikir; (2) memerhatikan masalah publik; (3) terbuka terhadap pengalaman baru; (4) yakin terhadap sains dan nalar; (5) berencana, tanggap, berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan; (6) aspirasi tinggi: berpendidikan, berbudaya, dan profesional (Inkeles, 1976; Inkeles & Smith, 1974).

Singkatnya modernisasi meliputi kemampuan yang makin besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masa mendatang; luasnya bidang perhatian dan berkembangnya potensi empati terhadap situasi dan terhadap orang lain; berkembangnya apresiasi kemajuan diri, mobilitas; dan meningkatnya penekanan perhatian pada masa kini sebagai dimensi waktu yang bermakna dari kehidupan manusia (Eisenstadt, 1983:226).

Modernisasi dapat terjadi dalam tiga cara, yaitu:

1. Sebagai akibat dari industrialisasi. Industrialisasi menyebabkan suatu keterlambatan yang memerlukan suatu perubahan dalam sikap dan perilaku yang berorientasi pada nilai-nilai baru.

2. Secara spontan sebagai akibat dari pertentangan antara masyarakat atau kebudayaan maju dan yang kurang maju.
3. Sebagai akibat dari suatu kegiatan pemerintah yang terencana, dalam upaya meningkatkan tingkat ekonomi dan kebudayaan modern.

Analisis permasalahan Implementasi Program *Community development* (pengembangan masyarakat) PT. Sebangun Bumi Andalas Wood Industries dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan OKI menggunakan pendekatan sistemik.

Kata "sistemik" digunakan dalam dua konseptualisasi. Pertama, sistemik sebagai lawan dari individual. Ketika suatu problem terkait pada masing-masing individu dan efektif dipecahkan secara individual, problem terkait pada banyak sistem dan memerlukan pemecahan komprehensif, disebut problem sosial dan memerlukan pemecahan sistemik. Adapun sistemik dalam konseptualisasi kedua adalah sistemik sebagai suatu pendekatan dalam manajemen program. Pendekatan sistemik dalam manajemen program adalah cara agar dapat dibuat rancangan program kegiatan dalam sekuensi waktu dan hasil antara sinkron dan efektif bagi pencapaian program. (Noeng muhadjir).

Program merupakan pernyataan tertulis tentang suatu yang harus dimengerti dan diusahakan. Program menggambarkan tentang apa yang harus dilaksanakan dan mengapa hal tersebut perlu dilaksanakan. Program dapat digambarkan berupa suatu pernyataan tertulis tentang situasi, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, masalah-masalah yang hendak dipecahkan dan cara-cara pemecahannya. (Kelsey dan Hearne, 1995).

Setiap program berlangsung dalam latar yang memiliki konsekuensi bagi efektivitasnya. Konteks utamanya ialah organisasi yang mensponsori dan mengadakan program. Program memiliki efek terhadap organisasi yang melaksanakannya. Efek tersebut boleh jadi menguntungkan (misalnya menaikkan prestise organisasi yang bersangkutan). Kerangka lingkungan sosial dan masyarakat yang lebih luas juga mempengaruhi program beserta konsekuensinya-konsekuensinya. Begitu pula sistem nilai hukum sensitivitas nasional. Kalau program 'tertanam' dalam konteks sosial, begitu pula orang yang mengikuti program. Ia memiliki kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola tingkah laku tertentu dan juga memiliki ide-ide sendiri. Seringkali tata pengaruh tata sosial yang ada bertentangan dengan upaya-upaya program yang ingin mengadakan perubahan.

E. Metode Penelitian

E.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, mulai dari gagasan dan ide penelitian, mengumpulkan data, menjawab permasalahan, dan tujuan penelitian, melakukan kategorisasi, sampai dengan membangun konsep dan proposisi-proposisi (Bungin, 2001).

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena dimana yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1997: 254).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI. Pemilihan lokasi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Desa tersebut merupakan tempat strategis yang merupakan salah satu desa yang berada di tengah-tengah kawasan pembangunan Hutan tanaman Industri
2. Asal-usul masyarakat desa Simpang Tiga Sakti merupakan perantauan yang mencari ikan melalui lelang lebak lebung pada era 1950-an dan kemudian berkembang dengan adanya usaha kayu ada era 1970-an.

Selain dilandasi oleh kerangka teoritik serta pertimbangan teknis, maka, *pertama*, lokasi penelitian memungkinkan dilakukannya pengkajian lebih dalam. *kedua*, latar kajian memungkinkan peluang-peluang yang lebih bermanfaat bagi pengamatan berbagai proses, seperti orang-orang, institusi kegiatan dan interaksi, serta struktur sosial yang menjadi kajian penelitian. *Ketiga*, lokasi penelitian memetakan strategi kehadiran peneliti dan *keempat*, latar kajian memungkinkan diperolehnya data yang berkualitas dan kredibilitas kajian.

E.3. Unit Analisis

Menurut Suharsini Arikunto, unit analisis adalah satuan-satuan yang menunjuk pada subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kelompok-Kelompok Tani yang terlibat dalam Program Pertanian Tanpa Bakar yang dijalankan oleh PT. SBA WI.

E.3. Batasan Penelitian

E.3.1. Konseptualisasi

1. Program *Community development* (*pengembangan masyarakat*) adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. (Budimanta, 2002).
2. Kesejahteraan sosial adalah usaha usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997).

E.3.2. Operasionalisasi

Pelaksanaan Program *Community development* (*pengembangan masyarakat*) dalam konteks penelitian ini adalah :

- Program perusahaan yang bertujuan membangun masyarakat atau komunitas yang ada di dalam maupun disekitar kawasan Hutan Tanaman Industri
- Program yang melibatkan masyarakat luas dalam pembangunan komunitas itu sendiri.

Peningkatan kesejahteraan sosial dalam konteks penelitian ini adalah :

- Pendekatan pembangunan yang memiliki sasaran masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan terutama yang tinggal didaerah terpencil didalam ataupun disekitar kawasan Hutan Tanaman industri.

E.4. Peranan Peneliti

Perananan peneliti dalam hal ini adalah pemeran serta sebagai pengamat. Buford Junker (Patton, 1980:131-132) menggambarkan tentang peranan peneliti sebagai pemeran serta sebagai pengamat adalah peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan (*participant as observer*).

E.5. Penentuan Informan

Penentuan subjek penelitian dan informan pada penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Sebaliknya dalam penelitian kuantitatif dipilih dari populasi sehingga dilakukan generalisasi dan responden

mewakili ciri-ciri populasi (Moloeng, 2002:181). Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin,2003; 206). Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan dengan cara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian (Bungin,2003 53).

Beberapa kriteria dalam menentukan informan awal dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, tinggal didesa yang berada didalam atau disekitar kawasan Hutan Tanaman Industri. *Kedua*, terlibat dalam program pertanian tanpa bakar.

Tabel 1.2.
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur (th)	Pendidikan	keterangan
1	Suharto	37	SD	Ketua Klp Tani Bangun Usaha
2.	Ebing	27	SD	Angg. Klp. Tani Bangun Usaha
3.	Darobat	58	SMP	Ket. Klp. Tani Bina Karya
4.	Romlah	60	SD	Angg. Klp. Tani Bina Karya
5.	Wahab	61	SD	Angg. Klp. Tani Bina Karya
6.	Matnata	40	SD	Angg. Klp. Tani Bina Karya
7	Sarmedi	40	SD	Angg. Klp. Tani Karya Usaha
8.	Hamim	45	SD	Ket. Klp. Tani Karya Usaha
9.	Kuyuk	40	SD	Angg. Klp. Tani Bangun Usaha
10	Boyo	52	SD	Angg. Klp. Tani Sakti Bersama
11	Antoni	30	SD	Angg. Klp. Tani Sakti Bersama
12	Karim	48	SD	Angg. Klp. Tani Keluarga Bersama

Sumber: data primer diolah

Proses pemenuhan tuntutan fokus kajian penelitian subjek dalam penelitian ini meliputi individu dan kelompok yang terlibat langsung maupun

tidak langsung dalam program *Community development* (pengembangan masyarakat) ini.

Informasi juga didapat melalui melalui *significant others* yaitu orang-orang yang dianggap penting karena memiliki kaitan yang erat dengan program ini. Teknik ini memungkinkan informasi yang diperoleh cukup mendalam ditinjau dari keragaman informasi yang diberikan.

F. Data dan Sumber Data

Menurut Loaf Loand, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti data dari jurnal-jurnal penelitian, koran, majalah dan dokumen (Moleong, 2002). Beberapa jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. **Data Primer**, yaitu sumber data utama yang berupa hasil pembicaraan dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian dan pihak-pihak terkait yang mampu memberikan keterangan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.
2. **Data Sekunder**, yaitu sumber data yang diperoleh sumber yang sifatnya secara tidak langsung mampu melengkapi data primer. Sumber data sekunder didapat melalui data tertulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

G.1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan di lapangan dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala yang berlangsung dalam proses sosial yang terjadi di lapangan dalam upaya menggali data kualitatif yang diukur secara tidak langsung berupa sikap, perilaku dan aktivitas (Marzuki, 1997).

Peneliti melakukan observasi kegiatan subjek penelitian dalam melakukan melaksanakan program *Community development (pengembangan masyarakat)* dengan cara datang ketempat lokasi penelitian.

G.2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2001: 110).

Dalam penelitian ini dilakukan proses wawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara dalam mencari data primer yang diperoleh dari para informan di kawasan penelitian serta melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat yang mampu memberikan informasi yang berkenaan dengan penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah berupa pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dalam pedoman wawancara dengan maksud agar

data-data yang ingin diperoleh peneliti lebih tersusun secara utuh. Wawancara tidak terstruktur, memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan ide, pandangan, pendapat pemikiran dan perasaan juga pengalaman secara luas tanpa batasan-batasan yang dibuat peneliti.

H. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu :

1. Pemrosesan satuan (*unityzing*)

Pada proses *unityzing* ada dua tahap yaitu tipologi satuan dimana pada tahap ini memberikan nama sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh subjek yang dikehendaki oleh latar penelitian, artinya peneliti menulis apa yang dipikirkan atau dikemukakan oleh informan dalam bentuk bahasanya yang akan diartikan oleh peneliti berdasarkan pengamatannya; kedua, yaitu penyusunan satuan yang terdiri dari informasi kecil yang memiliki arti yang kemudian disusun untuk memudahkan kategorisasi. Informasi-informasi yang didapatkan akan disusun berdasarkan permasalahan yang dibicarakan.

2. Kategorisasi

Satu tumpukkan data yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Informasi-informasi tadi akan dikategorikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Penafsiran data

Proses ini menggunakan metode deskriptif semata-mata yang menggambarkan dan menceritakan penelitian yang sesuai dengan permasalahan diatas (Moleong, 1998:191).

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua menguraikan tentang hasil-hasil penelitian dengan tema yang pernah dilakukan berkaitan dengan permasalahan penelitian dan buku-buku yang membahas konsep-konsep dalam penelitian ini.

BAB III DESKRIPSI LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN

Bab tiga mendeskripsikan gambaran tentang wilayah penelitian secara umum tentang Desa Simpang Tiga Sakti maupun secara khusus mengenai deskripsi PT. Sebangun Bumi Andalas

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bab empat berisikan tentang uraian interpretasi serta analisis data terhadap hasil temuan dilapangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir pada akhir tulisan ini akan di kemukakan kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta. Tiara wacana Yogya.
- Afrizal, MA, DR. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang. Andalas University Press.
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Baut, Paul.S. 1990. *Dilema Arus Pembangunan*. Jakarta. YLBHI.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi/David Berry; Penerjemah, Paulus Wirutomo*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Black, James A. dan Dean J. Champion. 1999. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Budimanta, A., Prasetijo, A., Rudito, B. 2004. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta. ICSD.
- Dietz, Ton. 2005. *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Erani Yustika, Ahmad. 2005. *Menjinakkan Liberalisme*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hardiyanto, Barid. 2005. *Pendidikan Rakyat Petani*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Iskandar, S. Untung. 2005. *Hutan tanaman industri: Skenario Masa Depan Kehutanan Indonesia*. Banten. Wana Aksara.
- Junadi, Purnawan. 1994. *Pengantar Analisis Data*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Mitchell, Duncan. 1984. *Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial*. Jakarta. Bina Aksara.
- Nugraha, A & Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Tangerang. Wana Aksara.
- Poloma, M. Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Probosutedjo, Ki, H. 2004. *HTI Membangun Masa Depan*. Jakarta. UMB-Press.

Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Rukminto Adi, Isbandi. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Lembaga Penerbit FE-UI.

Saefuddin, Asep, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Salim, H.S., S.H., M.S. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Soesanto, Astrid S. 1985. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Jakarta. Bina Cipta.

Suharto, Edi, Ph.D. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.

Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada Mulia.

Buletin *Hutan Tanaman* berkala ilmiah. Vol.1 no.1 Desember 2003. yogyakarta. Pusat penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan.